

BAB III

KESIMPULAN

Dari pertanyaan yang diajukan, diskripsi dan penjelasan yang dikemukakan, dengan menggunakan kerangka teoritik, sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, *pertama*, kebijakan politik luar negeri Malaysia semasa Mahathir mengalami pergeseran strategi politik jika dibandingkan dengan pada masa pemerintahan Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, dan Tun Hussien Oon. Pergeseran itu bisa dilihat dengan kebijakan politik yang semula ke Barat (Inggris) sekarang ke Timur (Jepang).

Beralihnya perhatian kebijakan politik luar negeri ini, sangat dipengaruhi oleh pergeseran konstelasi ekonomi-politik global yang semula bipolar, di mana Amerika Serikat dan Masyarakat Eropa sebagai “polisi dunia”, sekarang semakin terdiversifikasi (multipolar) dengan kemunculan Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Hongkong serta menyusul Cina yang diramalkan banyak pihak sebagai kekuatan raksasa ekonomi dunia.

Kedua, dalam usia kemerdekaannya 42 tahun, Malaysia memang diakui sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang menjalankan sistem kehidupan demokrasi dan politik kenegaraan yang relatif stabil dan dinamis. Hal ini didorong oleh keberhasilan pembangunan ekonomi yang relatif sukses dengan mengutamakan perbaikan struktur perekonomian etnis melayuyang sejak masa jajahan kolonial Inggris

mengalami marjinalisasi. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin runyam dan akut ini mendorong terjadinya perselisihan antar etnik (Melayu-Cina) yang tak bisa dielakkan pada tanggal 13 Mei 1969. Ledakan 13 Mei 1969 ini merupakan momen-momen penting bagi elit politik Melayu untuk mengoreksi diri (komunitas Melayu) guna merumuskan kehidupan sosial-ekonomi bumiputera yang lebih modern.

Di samping keberhasilan Mahathir menciptakan stabilitas politik dengan cara meredam sentimen rasial, Mahathir juga dinilai telah sukses melanjutkan program NEP (New Economic Policy), yang dimulai tahun 1971-1990, dengan tujuan pertama, memberantas kemiskinan di kalangan semua masyarakat Malaysia, dan kedua, membangun kembali masyarakat Malaysia dalam rangka mengurangi dan menghilangkan sama sekali identifikasi ras dengan fungsi ekonomi dan lokasi geografis. Program pertama, sudah barang tentu bersifat non-etnik, sementara program kedua secara transparan dinyatakan untuk memperbaiki dan membenahi struktur ekonomi etnik Melayu serta memperkecil dominasi etnik Cina dalam pemusatan sektor-sektor strategis. Program ini diharapkan mampu menemukan titik perimbangan dalam penguasaan tingkat sosial-ekonomi, sehingga memperkecil sentimen primordial-kebangsaan (rasial) dan kecemburuan sosial.

Ketiga, hampir seperempat abad pelaksanaan program NEP, Malaysia benar-benar menjadi “negeri Melayu” yang tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan lainnya secara merata dirasakan oleh semua etnik. Distribusi kekayaan ekonomi nasional berjalan secara proporsional dengan 40 persen untuk etnik Cina dan India, 30 persen untuk etnik Melayu, dan 30 persen untuk investor asing. Kebijakan ini

sangat bertolak belakang dengan kebijakan Indonesia yang dengan jumlah 4 persen etnik Cina telah menguasai 80 persen sektor ekonomi republik ini.

Keempat, pergeseran kebijakan politik luar negeri Malaysia semasa Mahathir dengan *Look East Policy*, sangat dipengaruhi oleh kejelian, kekritisian dan kecerdasan Mahathir membaca kecenderungan pergeseran kekuatan ekonomi-politik global yang semakin menampakkan identitasnya di kawasan Asia Timur (Timurisasi dunia).*